



▶ **ABDI MASYARAKAT**

# Tahun Depan, Pengurus RT/RW di Jogja Terima Honor

**JOGJA**—Pelayan masyarakat di tingkat terbawah seperti rukun tetangga dan rukun warga di Kota Jogja bakal menerima honor dari Pemerintah Kota Jogja. Sayangnya, untuk besaran honor, hingga kini masih dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja.

*Luqas Subarkah  
luqas@harianjogja.com*

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemkot Jogja, Octo Noor Arafat mengatakan setidaknya ada tiga dasar hukum yang diacu terkait dengan pemberian honor tersebut. Masing-masing adalah mengacu pada Pasal 19 Perda DIY No.5/2014 tentang Pelayanan Publik; Permendagri No.1/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK; dan Perda No.12/2002 tentang Pedoman Pembentukan LPMK, RT dan RW. "Untuk nominalnya berapa, masih kami godok. Tergantung nanti

▶ Para penerima honor di antaranya adalah Ketua RT/RW, Ketua Pengurus Kampung, Ketua LPMK, dan Ketua Tim Penggerak PKK dari kecamatan hingga RT.

▶ Besaran honor harus menyesuaikan kemampuan daerah.

hasil pembahasan TAPD yang didasarkan pada evaluasi Gubernur DIY. Namun yang pasti peraturan Wali Kota terkait dengan hal itu mulai berlaku pada 1 Januari 2020," kata dia, Senin (21/10).

Secara keseluruhan, para pelayan masyarakat di tingkat terbawah yang bakal menerima honor nantinya adalah Ketua RT/RW, Ketua Pengurus Kampung, Ketua LPMK, dan Ketua Tim Penggerak PKK dari kecamatan hingga RT.

Dia menegaskan pemberian honor kepada pelayan masyarakat baru kali ini dilakukan oleh Pemkot Jogja. Namun, imbuhan dia, beberapa kabupaten

seperti Sleman dan Kulonprogo sudah melakukannya lebih dulu.

Dia juga menegaskan kebijakan tersebut dipastikan legal lantaran memiliki landasan hukum yang jelas. Adapun soal besaran honor, dia berharap nantinya TAPD mempertimbangkan kemampuan daerah. "Karena kami [Bagian Tapem] menyerahkan besarnya ke TAPD. Sesuai kemampuan keuangan saja. Kalau susah, baru kami buat keputusan wali kota untuk penetapan besaran honorariumnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi mengatakan peran pengurus Ketua RT/RW, Ketua Pengurus Kampung, Ketua LPMK, dan Ketua Tim Penggerak PKK terbilang cukup sentral, khususnya bagi pengimplementasian program-program pemerintah.

Pasalnya para pelayan masyarakat tersebut yang lebih memahami soal seluk beluk permasalahan yang ada di masyarakat. "Jadi implementasi program pemerintahan, bisa dibilang sangat mengandalkan para pelayan masyarakat itu," ucap Heroe.



**Octo Noor Arafat**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005